PROCEEDING

Seminar Nasional
Ikatan Alumni (IKA)
Universitas Negeri Yogyakarta
2012

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBANGUN BANGSA

PROCEEDING

Seminar Ikatan Alumni (IKA)
Universitas Negeri Yogyakarta

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBANGUN BANGSA

Tim Penyusun

1. Sismono La Ode
2. Dwi Siswoyo
3. Aprilia Tina Lidyasari

Press
ika uny

PROCEEDING

Seminar Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Yogyakarta
"IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBANGUN BANGSA"

Cetakan I, Agustus 2012

Penyunting: Sismono La Ode
Tata Letak: Ariani, S.Pd.T.
desain Sampul: Ariani, S.Pd.T.

ISBN 978-602-99192-1-9

diterbitkan oleh
IKAUNY Press
Alamat
Graha Alumni Kantor IKA UNY
Kampus UNY Karangmalang, Yogyakarta
Telp/Faks: (0274) 552060
e-mail: ikaunypress_uny@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KdT)
xii + 468 hlm; 215,9 x 279,4 mm

Daftar Isi

1. SAMBUTAN REKTOR UNY — V
2. SAMBUTAN KETUA IKA UNY — VII
3. SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL DAN TEMU ALUMNI — VIII
4. DAFTAR ISI — X

Keynote Speaker

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MEMBANGUN BANGSA — 1

Pemakalah Utama

1. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBANGUN BANGSA — 7
2. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBANGUN BANGSA — 13
3. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM *SETTING* MASYARAKAT BANTUL — 23
4. PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SETTING KELUARGA DAN MASYARAKAT — 27

Pemakalah Pendamping

1. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF HUMANIORA — 33
2. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KEGIATAN DI SEKOLAH DAN KAMPUS — 47
3. PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA — 55
4. POLA ASUH *OTORITATIF* SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DALAM *SETTING* KELUARGA — 65
5. TRANSFORMASI NILAI AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA — 75
6. OPTIMALISASI PERAN ORANG TUA DALAM *CHARACTER BUILDING* ANAK DALAM *SETTING* KELUARGA — 87
7. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA: STUDI KASUS SUKU SAMIN DI DUKUH BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH — 103
8. PENANAMAN NILAI-NILAI MORAL ANAK USIA DINI MELALUI KEGIATAN BERCERITA BERTEMA CERITA RAKYAT BUDAYA LOKAL — 117
9. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMANFAATAN MEDIA AUDIO PAUD — 129
10. MEMBANGUN KARAKTER ANAK MELALUI KESANTUNAN BERBAHASA — 139
11. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR — 151
12. OPTIMALISASI PEMBENTUKAN KARAKTER DAN KEDISIPLINAN SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN — 161
13. MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK MELALUI PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH

DASAR — 173
14. PENANAMAN *SELF EFFICACY* MAHASISWA CALON GURU IPA SEKOLAH DASAR MELALUI REDESAIN 5 E *LEARNING CYCLE* — 183
15. PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN MEMBANGUN KARAKTER KERJA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS *LESSON STUDY* — 197
16. PERAN PENDIDIKAN SAINS DALAM PEMBENTUKAN PESERTA DIDIK YANG RELIGIUS — 207
17. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK MELALUI PROGRAM SEKOLAH — 219
18. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER AKHLAK MULIA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MELALUI PROSES PELAJARAN BAHASA INDONESIA — 231
19. PERAN PENTING TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DALAM PENGUATAN BUDAYA SEKOLAH UNTUK IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER — 241
20. UPAYA PENGEMBALIAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK YANG HILANG DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH — 253
21. BAHAN AJAR MEMBACA CERITA FIKSI REALISTIK BERBASIS KECERDASAN SPIRITUAL UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER — 263
22. PENANAMAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA YANG MENYENANGKAN — 273
23. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI UNTUK MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH — 285
24. SASTRA ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SETTING SEKOLAH — 297
25. MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI SEKOLAH SIAGA BENCANA — 307
26. WOODBALL SEBAGAI MEDIA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DALAM PENDIDIKAN JASMANI — 317
27. PEMBELAJARAN PENCAKSILAT DI SEKOLAH SEBAGAI SUMBER NILAI DALAM PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA — 327
28. KIAT PELAJARAN SEJARAH YANG BERKARAKTER — 337
29. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA DALAM SETING SEKOLAH — 349
30. PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MELALUI PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI — 361
31. MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS UNTUK KEMANDIRIAN HIDUP — 369
32. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN IPA (SAINS) — 381
33. MEMBANGUN KECERDASAN SOSIAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI — 397

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI UNTUK MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH

Oleh Suranto

suranto@uny.ac.id

Abstrak

Terdapat berbagai kondisi faktual di sekolah dan masyarakat yang menyebabkan pendidikan budi pekerti mendesak atau *urgen* diimplementasikan di sekolah, misalnya kurangnya pemahaman peserta didik tentang etika dan tata karma, sering dilupakannya nilai-nilai kejujuran, seringnya terjadi pelanggaran disiplin, kurang menghargai perbedaan, rendahnya semangat pengembangan diri, dan menurunnya integritas antara kata dan tindakan. Fungsi pendidikan budi pekerti adalah sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, acuan berinteraksi dengan orang lain, acuan menilai suatu tindakan baik atau buruk, sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif, sebagai dasar bagi penertiban kehidupan sekolah, dan rambu-rambu berisi anjuran larangan dan sanksi. Strategi implementasi pendidikan budi pekerti dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: kegiatan kerohanian secara rutin, kerja bakti di sekolah, upacara bendera, lomba olah raga antarkelas, peraturan tata tertib, penyelenggaraan mata pelajaran budi pekerti, penggunaan seragam sekolah, tata kerapian penampilan (rambut, perhiasan, dll.).

Kata kunci: Budi pekerti, karakter, peserta didik.

Pendahuluan

Dewasa ini masyarakat pendidikan sedang menghadapi tantangan berat yang merupakan konvergensi dari berbagai dampak globalisasi. Situasi global dunia yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi berbasis komputer secara massif, telah menciptakan gejala umum bahwa peserta didik di sekolah sangat mudah mendapatkan terpaan informasi dari media. Giliran berikutnya pola perilaku peserta didik mengalami banyak perubahan. Nilai-nilai tata karma, sopan santun yang bersumber dari budaya lokal yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh masyarakat, ada kecenderungan mulai dilupakan. Kondisi faktual menunjukkan kurangnya pemahaman peserta didik tentang etika dan tata karma, sering dilupakannya nilai-nilai kejujuran, seringnya terjadi pelanggaran disiplin, kurang menghargai perbedaan, rendahnya semangat pengembangan diri, dan menurunnya integritas antara kata dan tindakan.

Berbagai masalah sebagai dampak globalisasi hanya dapat diatasi dengan solusi

yang berbasis peningkatan kualitas manusia, khususnya berbasis pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dan moral/budi pekerti.

Selama ini pendidikan cenderung diartikan aktivitas untuk mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk memasuki kehidupan masyarakat orang dewasa dan dunia kerja. Aktivitas pendidikan didominasi oleh kegiatan belajar mengajar di sekolah. Arah yang akan dituju oleh proses pendidikan itu biasanya terjabarkan ke dalam kurikulum. Dilihat dari kurikulum yang umum diberlakukan dewasa ini, menunjukkan bahwa orientasi pendidikan sangat didominasi oleh mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan aspek penguasaan Ipteks/keilmuan/akliyah. Sedangkan yang berorientasi pada pengembangan moral/ budi pekerti/ nakliyah hanya sedikit sekali diberikan.

Permasalahannya adalah bahwa pendidikan yang mengutamakan pengajaran Ipteks melupakan pendidikan budi pekerti akan menghasilkan profil peserta didik yang kuat di Ipteks namun lemah di moral. Unggul di cipta tetapi lemah di rasa dan karsa. Kalau sudah demikian, ketika berinteraksi di masyarakat maupun di dunia kerja, para pemuda hanya pandai atau terampil dalam ilmu dan teknologi, tetapi gagap moral dan etika. Akibatnya cipta tidak dipandu oleh rasa dan karsa. Ilmu tidak dipandu etika dan tindakan. Akliyah tidak dipandu nakliyah dan amaliah. Hal ini berbahaya, ketika Ipteks itu diimplementasikan dalam dunia kerja, maka Ipteks itu akan tidak dikendalikan atau dikawal oleh moral budi pekerti sehingga serakah, merusak, merugikan bangsa. Dengan demikian kelemahan kualitas sumberdaya manusia justru disebabkan oleh rendahnya kecakapan budi pekerti.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 ditegaskan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dengan demikian sangat jelas bahwa undang-undang ini mengamanatkan dan menegaskan arti penting pendidikan kecakapan budi pekerti para peserta didik.

Sementara itu dalam UU Sisdiknas, Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi moral dan hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan membawa dampak yang mendasar pada manajemen, kebijakan operasional, dan kinerja satuan pendidikan (sekolah). Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan penyelenggaraan pendidikan, bahwa manajemen, kebijakan operasional, dan kinerja satuan pendidikan (sekolah) harus berwawasan budi pekerti. Dapat pula dikatakan, bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar, maupun Undang-undang tersebut maka seluruh komponen tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan hendaknya mengupayakan implementasi pendidikan budi pekerti

di sekolah yang tercermin dalam kinerja semua komponen pendidikan untuk terciptanya pribadi-pribadi peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Komponen-komponen tersebut meliputi: proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, pembinaan kesiswaan, pengelolaan sarana prasarana, pemanfaatan dan pemberdayaan ketenagaan, pengaturan administrasi dan penciptaan suasana sekolah yang kondusif.

Era reformasi memberi makna bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, ialah agar pengembangan pendidikan ditata kembali dan dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya di masyarakat. Orientasi pengembangan pendidikan harus senantiasa terkait dengan visi pembangunan suatu bangsa. Hal ini disebabkan, secara teoritis terdapat pola hubungan timbal balik antara variabel pembangunan dan pendidikan. Pembangunan yang sukses memerlukan dukungan pendidikan, sebaliknya pendidikan akan sukses apabila proses pembangunan nasional juga berproses secara memadai.

Pembangunan yang berpusat pada manusia secara konseptual adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk manusia. Tujuan pembangunan bukan saja untuk terbebasnya manusia dari kebodohan dan kemiskinan, tetapi untuk pengembangan kualitas manusia secara utuh dan komplit. Iptek dan moral. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya berorientasi pada perubahan kuantitatif yaitu produk-produk material yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia, melainkan yang lebih penting adalah muaranya ke arah perubahan kualitatif *(being)* sehingga setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensi dirinya secara komplit lahiriah-batiniah, pengetahuan-keterampilan-moral, fisik-mental. Amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (3) UUD 1945, menugaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Budi Pekerti

Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat banyak sekali norma sosial yang mengatur warga masyarakat agar berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain secara baik dan harmonis. Salah satunya dinamakan budi pekerti. Bahkan budi pekerti luhur merupakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai universal. Memposisikan nilai-nilai budi pekerti dalam perilaku hidup sehari-hari, akan mewujudkan kepribadian yang berkualitas: *tanggap* (peka), *tatag* (tahan uji), dan *tanggon* (dapat diandalkan).

Pendidikan budi pekerti pada hakekatnya adalah merupakan usaha sistematis untuk memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia, termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik. Program pendidikan kecakapan budi pekerti dapat dilakukan seiring bahkan simultan dalam program pembelajaran dalam mengembangkan potensi peserta didik baik yang menyangkut olah otak, olah hati, olah rasa dan olah raga.

Secara Etimologis, budi pekerti berasal dan kata budi dan pekerti. Kata budi berasal dan *bud* yang dalam bahasa Sansakerta berarti kesadaran, budi, pengertian,

pikiran dan kecerdasan. "pekerti" berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan, atau perilaku. Dengan demikian, secara etimologis budi pekerti berarti penampilan diri (aktualisasi diri) yang berbudi.

Secara leksikal, budi pekerti berarti tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Istilah budi pekerti dalam kosa kata Arab adalah akhlak, dalam kosa kata Latin/Yunani adalah etika dan dalam bahasa inggris *ethics*. Secara konsepsional, budi pekerti adalah budi yang dipekertikan (dioperasionalkan, diaktualisasikan, atau dilaksanakan) dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan jati diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Secara operasional, budi pekerti merupakan perilaku positif yang tercermin dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap, perasaan, keinginan, dan hasil karya. Balitbang Depdiknas (2005) menjelaskan bahwa budi pekerti secara konsepsional adalah budi yang dipekertikan (dioperasionalkan, diaktualisasikan atau dilaksanakan) dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pribadi, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Budi pekerti secara operasional merupakan suatu perilaku positif yang dilakukan melalui kebiasaan. Artinya seseorang diajarkan sesuatu yang baik mulai dari masa kecil sampai dewasa melalui latihan-latihan dan keteladanan, misalnya cara berpakaian, cara berdandan (berhias), cara bertamu, cara berbicara, cara bertelepon, cara menyapa dan menghormati orang lain, cara bersikap menghadapi tamu, cara makan dan minum, cara masuk dan keluar rumah dan sebagainya. Budi pekerti yang mempunyai arti yang sangat jelas, yaitu: **perbuatan** (Pekerti) yang dilandasi atau dilahirkan oleh **pikiran yang jernih dan baik** (Budi). Dengan definisi yang teramat gamblang dan sederhana dan tidak muluk-muluk, setiap orang dalam menjalani kehidupan ini semestinya dengan mudah dan arif dapat menerima tuntunan budi pekerti. Budi pekerti untuk melakukan hal-hal yang patut, baik dan benar.

Kalau seseorang berbudi pekerti, maka jalan kehidupan paling tidak tentu selamat, sehingga dapat berkiprah menuju ke kesuksesan hidup, kerukunan antar sesama dan berada dalam koridor perilaku yang baik. Sebaliknya, seseorang melanggar prinsip-prinsip budi pekerti, maka akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, dari yang sifatnya ringan, seperti tidak disenangi orang lain, sampai yang berat seperti: melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat dipidana.

Pendidikan budi pekerti sering juga diasosiasikan dengan tata krama, sopan-santun, dan etiket yang berisikan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, norma, aturan, nilai. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan perbuatan. Dengan demikian tata krama berarti adat sopan santun yang menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sering terjadi benturan-benturan nilai dan norma-norma yang dirasakan oleh warga masyarakat. Apa yang dahulu dianggap benar mungkin sekarang sudah menjadi salah. Apa yang dulu dianggap tabu dibicarakan sekarang sudah menjadi suatu yang lumrah. Misalnya berbicara masalah pacaran. Dahulu yang boleh berpacaran hanyalah anak-anak muda yang sudah bekerja, atau sudah dewasa dan tidak bersekolah lagi.

Tetapi Sekarang, zaman telah berubah. Siswa SMP sudah banyak yang mengenal pacaran, bahkan kalau tidak berpacaran dianggap ketinggalan zaman. Jadi yang diperlukan di sini adalah norma-norma budi pekerti yang luhur yang tidak usang, melainkan tetap relevan untuk mengawal agar perilaku remaja, termasuk dalam berpacaran berada dalam koridor norma budi pekerti. Secara konsepsional pendidikan budi pekerti merupakan:

1) Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi luhur dalam segenap peranan dan perilakunya di masa yang akan datang.
2) Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perilaku peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara selaras, serasi, seimbang lahir-batin, jasmani-rohani, material-spiritual, dan individu-sosial.
3) Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara operasional, pendidikan budi pekerti merupakan upaya untuk membekali peserta didik melalui berbagai bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, pendampingan, pendidikan dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal bagi masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama mahluk, sehingga terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada kebiasaan perilaku dan kultur, berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa

Menurut Deal Savage & Armstrong (1996: 104),"*culture is defined as the constellation of values, beliefs and institutions unique to given group of people*". Hal ini berarti, bahwa kultur adalah rangkaian nilai, kepercayaan, dan adat yang unik yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Schein, E.H. (1985), menjelaskan kultur sebagai "suatu pola asumsi dasar hidup yang diyakini bersama: yang diciptakan, diketemukan atau dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dan dapat digunakan mengatasi persoalan hidup mereka, oleh karenanya diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai pegangan perilaku, berpikir, dan rasa kebersamaan di antara mereka". Sementara itu dalam UU Sisdiknas, Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan budi pekerti merupakan proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi dan fisik (untuk mendapatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual) serta mendekatkan anak didik pada alam sekitar dan kehidupan nyata di masyarakat. Sehubungan dengan itu maka jelaslah bahwa pendidikan budi pekerti tidak dapat mengubah budi pekerti seseorang secara "instan", tetapi memerlukan proses yang terus menerus (bukan hanya dalam ruangan kelas saja).

Strategi Implementasi Pendidi-

kan Budi Pekerti

Implementasi pendidikan budi pekerti di sekolah, dapat dilakukan dengan strategi monolitik, integratif, otodidak, maupun internalisasi. Monolitik, artinya bahwa pendidikan budi pekerti dilaksanakan dengan cara menampilkan mata pelajaran yang berdiri sendiri di dalam kurikulum sekolah. Misalnya, menjadi salah satu mata pelajaran dalam kelompok muatan lokal. Dengan sistem KTSP yang berlaku sekarang, secara teoritis sangat memungkinkan implementasi pendidikan budi pekerti dilaksanakan dengan strategi monolitik karena sekolah memiliki otoritas untuk menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sebenarnya, asalkan ada kemauan, sekolah dapat berinisiatif sendiri menambahkan mata pelajaran budi pekerti dalam kurikulum. Ini dimungkinkan karena KTSP memberi kelonggaran kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan. Kendalanya adalah pada kondisi faktual bahwa kurikulum di sekolah sudah padat, sehingga dianggap kurang relevan apabila menambah mata pelajaran baru.

Strategi integratif, merupakan cara penyampaian materi pendidikan budi pekerti diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan, misalnya dalam mata pelajaran Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sebagainya. Strategi integratif ini menuntut kesungguhan dan komitmen, sehingga penguasaan materi pendidikan budi pekerti menjadi salah satu indikator dalam evaluasi hasil pembelajaran.

Otodidak, berarti siswa belajar sendiri nilai-nilai budi pekerti tanpa bantuan guru. Dalam hal ini segala kondisi yang ada di sekolah maupun di masyarakat pada hakikatnya merupakan sumber belajar yang penting bagi siswa. Namun strategi otodidak ini memiliki kelemahan, karena mungkin saja siswa belajar sendiri nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sedangkan nilai-nilai tersebut tidak selamanya sesuai dengan kriteria budi pekerti yang baik.

Strategi internalisasi ialah penanaman nilai-nilai budi pekerti ke dalam fikiran atau kepribadian, sehingga menjadi kesadaran dan kebenaran yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang ditempuh adalah dengan pembiasaan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis (2011) mengungkap bahwa seluruh sekolah sampel sudah mengimplementasikan pendidikan budi pekerti. Strategi pendidikan budi pekerti di sekolah dilakukan dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang relevan dengan kebutuhan, sumber daya manusia, fasilitas, dan kondisi di sekolah tersebut.

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh kegiatan yang strategis untuk alternatif wahana implementasi pendidikan budi pekerti.

1) *Kegiatan kerohanian secara rutin.* Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa guna memperoleh pengetahuan nilai-nilai budi pekerti yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. Penekanan kegiatan ini bahwa aktivitas manusia pada hakikatnya selalu dalam penilaian oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama, maka aktivitas itu dipujikan dan mendapat *reward* berupa pahala. Namun apabila tidak sesuai dengan ajaran agama, tindakan tersebut berdosa.

2) *Warung kejujuran.* Dewasa ini banyak sekolah membuka "warung kejujuran", ialah sebuah warung yang berlokasi di sekolah yang menyediakan makanan, minuman dan berbagai keperluan sekolah dan dikelola dengan sistem tanpa penjaga warung. Pengunjung mengambil "barang dagangan" dan membayarnya sendiri di meja kasir. Uang kembalian juga mengambil sendiri. Pelajaran budi pekerti yang dapat kita ambil dari adanya *warung kejujuran* adalah pelajaran nilai-nilai kejujuran. Meskipun tidak ada penjaga warung, tetapi siswa harus jujur, karena semua perbuatan ada yang mengawasi yaitu Tuhan.

3) *Kerja bakti di sekolah.* Kegiatan ini untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti terutama terkait dengan nilai kerjasama, tolong menolong, dan tanggungjawab.

4) *Upacara bendera.* Upacara bendera merupakan wahana yang baik untuk implementasi nilai-nilai budi pekerti khususnya untuk membentuk karakter kebangsaan dan kebanggaan hidup berbangsa, yaitu kebanggaan dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara yang meliputi: bendera dan lagu kebangsaan, pemimpin negara, serta bahasa nasional.

5) *Lomba olah raga antarkelas.* Kegiatan ini sangat baik untuk menanamkan nilai sportivitas, kedisiplinan, dan sikap siap menang siap kalah secara ksatria.

6) *Peraturan tata tertib sekolah.* Setiap sekolah memiliki tata tertib sebagai peraturan berperilaku (*rule of conduct*). Siswa sebagai warga sekolah berkewajiban untuk menjunjung tinggi tata tertib itu, baik itu tata tertib berpakaian, tata tertib peminjaman buku perpustakaan, tata tertib ujian, dan sebagainya. Jangan pernah merasa bangga ketika melanggar tata tertib sekolah, justru seharusnya merasa bersalah, dan tidak mengulanginya lagi. Banyak sekolah yang menerapkan peraturan, melarang siswa membawa alat komunikasi (*handphone*). Hal ini disebabkan seringnya terjadi penyalahgunaan *handphone* dengan segala macam fasilitas/fiturnya.

7) *Visi dan misi sekolah.* Dalam kaitannya dengan Pendidikan Budi Pekerti, maka visi sekolah yang bernuansa budi pekerti merupakan imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Ibarat seorang pemuda, mungkin mencita-citakan bagaimana keluarga yang diinginkan ketika suatu saat ia sudah menginjak usia tua. Mungkin terbayangkan memiliki seorang istri yang sabar dan setia, anak-anak yang cerdas, shaleh dan berbakti pada orang tua, memperoleh pekerjaan yang bagus, penghasilan yang cukup, rumah yang nyaman dengan tetangga yang rukun dan seterusnya. Analog dengan itu, mungkin kita mengimajinasikan sekolah yang bermutu bagus, diminati oleh masyarakat, memiliki jumlah guru yang cukup dengan kualitas yang baik, fasilitas sekolah yang baik, dan peserta didik yang mencerminkan perilaku akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat.

8) *Seragam sekolah.* Setiap pelajar hendaknya berpakaian dan berdandan sesuai dengan peraturan sekolah. Setiap siswa hendaklah berpakaian sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi dan pan-

tas. Selain itu, tampak kurang pantas jika pelajar bersolek secara berlebihan. Tampak kurang pantas jika pelajar putri memakai perhiasan secara berlebihan. Hal itu akan menimbulkan kesan seolah-olah kita menjadi "etalase" berjalan.

9) *Tata kebersihan fasilitas sekolah seperti kamar kecil dan taman.* Kamar kecil dan taman, merupakan fasilitas yang penting di sekolah. Kita harus merawat sebaik-baiknya fasilitas itu. Namun kenyataannya masih banyak kamar kecil di sekolah yang tampak jorok, karena orang tidak menyiram secukupnya setelah selesai menggunakannya. Selain itu, banyak pula tisu bertebaran di sana. Adapula coretan-coretan di dinding kamar mandi. Sehingga dinding itu sudah beralih fungsi menjadi tempat beradu argumentasi melalui tulisan, dan gambar. Kebanyakan tulisan dan gambar itu tidak sopan. Hal ini tentu sangat merugikan kita semua, karena kebersihan kamar kecil menjadi indikator yang mencitrakan kesadaran kebersihan pemilik dan penghuninya.

Esensi strategi pendidikan budi pekerti ialah sebuah pencarian metode-metode pendekatan kepada peserta didik untuk dapat menyampaikan materi pendidikan budi pekerti melalui proses yang cerdas, santun, dan tidak mengindoktrinasi. Pendidikan budi pekerti dimaksudkan untuk menciptakan situasi kehidupan dan budaya sekolah yang dapat menunjang terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif. Pendidikan budi pekerti dimaksudkan sebagai upaya pencerahan dan pemuliaan peserta didik sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dapat menunjukkan kualitas budi pekerti yang unggul, baik dalam bersikap, berucap, dan bertindak dalam menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan pendidikan efektif.

Materi pendidikan budi pekerti bagi para peserta didik dihimpun berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan masyarakat yang meliputi nilai ketakwaan, kebangsaan, sopan santun pergaulan, kejujuran, kedisiplinan, ketertiban, kerapian, dan nilai-nilai yang mengandung semangat belajar dan motivasi memikirkan masa depan yang lebih baik.

Untuk strategi pendidikan budi pekerti di sekolah dapat dilakukan melalui tiga tataran yaitu:

a. Pengembangan pada tataran spirit dan nilai-nilai yang meliputi spirit dan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keterbukaan, kejujuran, semangat hidup belajar, menyadari diri sendiri dan keberadaan orang lain, persatuan dan kesatuan, untuk selalu bersikap dan prasangka positif, disiplin diri, tanggung jawab dan kebersamaan.
b. Pengembangan pada tataran teknis, yaitu:
   1) Struktur organisasi sekolah,
   2) Deskripsi tugas sekolah,
   3) Tata tertib guru,
   4) Tata tertib siswa,
   5) Standar sistem pembelajaran yang harus diikuti guru dan siswa,
   6) Hubungan formal dan informal antar kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan atau sesama guru dan tenaga kependidikan termasuk hubungan dengan siswa,
   7) Berbagai sanksi bagi siswa yang tidak jujur dan tidak disiplin,

8) Berbagai program kerja dalam rangka membina keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
9) Berbagai program kerja sekolah dalam rangka membiaskan siswa melakukan pemecahan masalah,
10) Berbagai program ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkembangkan kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat hidup, persatuan dan kesatuan,
11) Berbagai strategi belajar dan pembelajaran yang mendorong siswa agar semangat belajar, dan
12) Berbagai aturan perawatan dan kebersihan fisik sekolah.

c. Pengembangan pada tataran sosial, pengembangan pada tataran sosial ini merupakan proses implementasi dan institusionalisasi, seluruh kebijakan dan aturan teknis yang dikembangkan berdasarkan spirit dan nilai-nilai sehingga menjadi kebiasaan (*work habits*) di sekolah dan di luar sekolah.

Simpulan

Kondisi faktual di sekolah dan masyarakat yang menyebabkan pendidikan budi pekerti mendesak atau *urgen* dilaksanakan adalah: kurangnya pemahaman siswa tentang etika dan tata karma, sering dilupakannya nilai-nilai kejujuran, seringnya terjadi pelanggaran disiplin, kurang menghargai perbedaan, rendahnya semangat pengembangan diri, dan menurunnya integritas antara kata dan tindakan. Fakta di masyarakat menunjukkan seringnya terjadi tawuran pelajar, siswa membolos pada jam pelajaran, dan sebagainya, semuanya menegaskan bahwa pendidikan budi pekerti mendesak dan penting untuk dilaksanakan.

Penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah memiliki berbagai fungsi penting, meliputi: sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, acuan berinteraksi dengan orang lain, acuan menilai suatu tindakan baik atau buruk, sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif, sebagai dasar bagi pemahaman dan penertiban kehidupan sekolah, rambu-rambu berisi anjuran larangan dan sanksi.

Daftar Pustaka

Ahmad Sonhadji. (2008). *Alternatif Penyempurnaan Pembaharuan Penyelenggraan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.* (http.//www. Depdiknas. go.id/sikep/issue/SENTRA1/F18.html).

Buttler, F. C. (1972). *Instructional System Development for Vocational and Technical Training.* New Jersey: Englewood Cliffs.

Fasli Jalal. (2005). *Kebijakan MONE dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia,* Simposium Internasional tentang Inclusion and the Removal of Barriers to Learning, Bukit tinggi, 26 – 29 September 2005.

DePorter. (1999). *Quantum Teaching: Mempraktekkan quantum learning di ruang kelas.* Terjemahan Ary Nilandari. Bandung: Mizan Media Utama.

Malley, M. C. (2000). *Creating Commitment.* New York: John Wiley & Sons, Inc.

Newstrom, J.W. and Davis, K. (1997). *Organizational Behavior.* New Delhi: Tata McGraw-Hill Company Limited.

Soedijarto. (1998). *Pendidikan sebagai Sarana*